

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK
PROSTITUSI DI KOTA MAKASSAR (2010-2014)**



**OLEH
IRMA PEBRIANTI
B 111 11 020**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK
PROSTITUSI DI KOTA MAKASSAR (2010-2014)**

**OLEH:
IRMA PEBRIANTI
B 111 11 020**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI DI KOTA MAKASSAR (2010-2014)

Disusun dan diajukan oleh:

IRMA PEBRIANTI


B111 11 020

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, 04 Juni 2015
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 1959 1010 199203 2 002


Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 1967 1010 199203 2002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. Anshadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IRMA PEBRIANTI

Nomor Pokok : B111 11 020

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Prostitusi di Kota
Makassar (2010-2014).

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

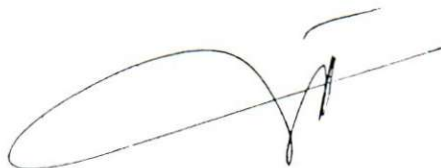
Makassar, Mei 2015

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **IRMA PEBRIANTI**
No. Pokok : B111 11 020
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar (2010-2014)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.



Makassar, Mei 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

IRMA PEBRIANTI (B11111020), Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar Tahun 2010-2014. (dibimbing oleh Prof.Dr.Muhadar.S.H.,M.S dan Hj.Nur Azisa.S.H.,M.H)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Prostitusi di Kota Makassar dan Bagaimana Upaya Penanggulangannya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa di Kota Makassar terdapat tempat-tempat prostitusi baik yang terselubung maupun yang nampak seperti Jalan Sumba khususnya Hotel Virgo. Pemilihan Hotel Virgo sebagai lokasi penelitian disebabkan karena alasan kuantitas (jumlah) para pelacur yang dipandang sebagai barometer intensitas praktik prostitusi di Kota Makassar.

Faktor penyebab terjadinya prostitusi di Kota Makassar adalah terdesak oleh kesukaran ekonomi, tidak ada lapangan kerja, dan arena sakit hati.

Upaya penanggulangan praktik prostitusi adalah upaya preventif dan upaya represif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang di susun dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar (2010-2014) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan tidak melupakan uluran tangan dan bantuan yang telah penulis peroleh dari berbagai pihak, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya atas segala bentuk bantuan baik materil maupun moril, kepada Ayahanda Drs. Mustan S.Sos dan Ibunda Dra. Hj. Sitti Jumrah serta saudara/i tercinta Zul Fajri, Wiwiek Wahyuni. S.P., Muh. Edyansyah, Azwar, dan segenap keluarga atas segala perhatian dan kasih sayangnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Muhadar.S.H.,M.S selaku pembimbing I dan Ibu Hj.Nur.Azisa.S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya dalam membimbing penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
2. Hj.Muliati.Said.S.T.M.M selaku orang tua pengganti di rumah.

3. Ibu Prof.Dr.Farida Patitinggi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Para Dosen dan Pegawai Akademik yang sudah membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Para sahabat-sahabatku : Ari Mentari, Sarpatih Saputri, Asma Jafar, A.Batari Toja, A. Ulfa Oetari Ashari, Srhy Rachmawaty, Anne Nunuhitu, Firman Hariansyah, Nilam Umami Qolbi, Fadilla Zainuddin, A. Mutmainnah kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. Saya berharap semoga kalian mendapat yang terbaik dalam hidup.
6. Pasangan Kekasih Rikki Purnama Rukyan.S.H terima kasih atas segala perhatian, ketulusan, motivasi dan dukungannya selama ini. Spirit yang kamu berikan membuatku selalu merasa lebih termotivasi dan lebih berani menatap kedepan. Kehadiranmu telah memberikan warna dalam hidupku.
7. Para mantan kekasih yang pernah hadir dalam hidupku Try Sutrisno, dan Muh. Ainun Fajrin yang pernah memberi canda, tawa, sedih, dan air mata. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat amin.

Makassar, Mei 2015
Penulis

Irma Pebrianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Prostitusi.....	9
B. Sejarah Singkat Perkembangan Prostitusi di Indonesia.....	11
C. Cara Melakukan Prostitusi	21
D. Jenis – Jenis Prostitusi.....	27
E. Pengertian Mucikari / Germo	28
F. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi dan Upaya Penanggulangannya	29

BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Data Empiris Praktik Prostitusi Di Kota Makassar	35
B. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Prostitusi Di Kota Makassar	42
C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Praktik Prostitusi Di Kota Makassar	45
BAB V. PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
Tabel 1	Daerah Asal Pelaku Prostitusi Di Hotel Virgo Makassar	36
Tabel 2	Usia Pelaku Prostitusi Di Hotel Virgo Kota Makassar	37
Tabel 3	Status Perkawinan Pelaku Prostitusi Di Hotel Virgo Kota Makassar	39
Tabel 4	Tingkat Pendidikan Pelaku Prostitusi Di Hotel Virgo Kota Makassar	41
Tabel 5	Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Di Hotel Virgo Kota Makassar	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Oleh karena itu segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Norma hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu agar tercipta keadilan sosial dalam masyarakat. Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan aturan hukum yang mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menata kehidupan sosialnya. Aturan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat merupakan manifestasi perasaan hukum masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*Living Law*). Dalam tatanan tersebut hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan dan atau selaras dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan.

Pandangan hukum pidana dengan hukum adat (*Living Law*) atau hukum yang hidup dalam masyarakat menimbulkan persoalan *pelik* terhadap ditetapkannya sifat melanggar hukum suatu perbuatan (*Wederrechtelijkheid*). Adakalanya pandangan hukum pidana tidak sinkron dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Artinya bahwa suatu perbuatan menurut ukuran yang berlaku dalam

masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum. Oleh karena itu harus dihukum, akan tetapi menurut hukum pidana, tidak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum (aturan - aturan hukum pidana). Ataupun sebaliknya suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tidak melanggar norma berlaku dalam masyarakat, tetapi dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, menurut hukum pidana.

Contoh kongkrit pertentangan pandangan di atas adalah perbuatan untuk melacurkan diri (Prostitusi). Bila kita memperhatikan pasal demi pasal dalam KUHP tidak satupun pasal yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang prostitusi, maka perbuatan melacurkan diri seorang wanita pelacur tidak dianggap sebagai suatu kejahatan menurut pandangan hukum pidana.

Bagaimanapun jahatnya suatu perbuatan bila tidak dilarang dalam suatu perundang - undangan yang berlaku berarti tidak dianggap sebagai kejahatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menganut azas *nullum delictum sine praevia lege poenale*, yang inti pokoknya menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, jika ketentuan dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.

Didasarkan sampai hari ini, di Indonesia yang melarang menjual jasa seks atau melakukan aktifitas lain yang sejenis. Hukum pidana

hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal seperti yang tertera di dalam KUHP Pasal 296, 2297, dan 506. KUHP juga melarang perdagangan wanita dibawah umur.

Jadi berdasarkan pasal - pasal tersebut, pada hakekatnya prostitusi tidak dianggap sebagai kegiatan yang dilarang menurut KUHP Indonesia, tetapi bila ditinjau dari norma yang hidup dalam masyarakat, maka prostitusi merupakan pelanggaran norma – norma sosial.

Berbicara soal prostitusi seperti halnya mengungkapkan masalah yang paling klasik di bumi ini, masalah tersebut memang telah lama berakar dalam peradaban manusia namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas, sulit ditentukan secara pasti kapan munculnya profesi ini, namun bisa dikatakan sejak adanya norma perkawinan, konon bersamaan itu pula lahirlah apa yang disebut prostitusi. Sebab prostitusi dianggap salah satu penyimpangan dari norma perkawinan dalam masyarakat.

Masalah prostitusi yang seringkali dibaca di beberapa media baik cetak maupun elektronik merupakan suatu bukti alasan penanggulangannya namun prostitusi tersebut tidak memperlihatkan tendensi menurun. Hingga kini hampir semua Ibukota provinsi di Indonesia dapat dijumpai rumah – rumah bordil yang menampung

puluhan sampai dengan ratusan wanita prostitusi, bahkan beberapa, Kota terpencil, wanita – wanita pelacur biasanya dikoordinir oleh germa untuk melakukan pekerjaannya.

Melihat kenyataan tersebut pihak yang berkomponen sebenarnya tidak tinggal diam, pihak kepolisian sering mengadakan razia terhadap wanita pelacur bahkan sering melakukan penangkapan dan penahanan, serta pihak Dinas Sosial telah berulang kali mengadakan rehabilitasi dan memberikan kursus – kursus terhadap wanita prostitusi, pemerintah kota telah mengeluarkan peraturan – peraturan dan mengambil kebijaksanaan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Keadaan menjadi ironis karena justru terjadi dimasyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai – nilai moral sebagaimana yang tertuang dalam sila – sila Pancasila.

Disetiap tempat pijat dan spa, wanita yang bertugas melayani lelaki hidung belang tidak langsung menawari pelanggannya melakukan seks. Namun dahulu memberikan ransangan sehingga membuat pelanggan yang meminta memberikan layanan plus.

Adapun anak remaja di Makassar yang berusia 14 – 17 tahun cenderung senang dengan tempat – tempat hiburan malam yang lagi marak di Kota Makassar, hal ini sangatlah merusak moralitas kalangan remaja. Pemerintah Daerah Kota Makassar juga bahkan menunjukkan peran aktifnya dalam memberantas permasalahan ini,

maraknya perbuatan remaja yang sering ketempat hiburan malam akan menimbulkan perbuatan a susila dan perbuatan kriminal lainnya.

Dari sini dapat dinilai banyaknya remaja terjerumus yang diakibatkan oleh sarana erotis dan pornografi yang dikelola oleh tempat hiburan malam tersebut. Jadi kearah mana dan bagaimana keseriusan Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk membina remaja di Kota Makassar.

Setidaknya pemerintah Kota Makassar harus serius untuk itu, dengan mengadakan pembinaan ahlaq dan nilai – nilai religi di tempat formal seperti sekolah atau kampus tempat perkuliahan yang diarahkan menuju perbaikan remaja dengan pendidikan seks, dampak dan keterpurukan nilai – nilai a susila didalamnya.

Mungkin dengan mencerminkan perilaku seperti ini dapat dicegah dan mengurangi perbuatan a susila yang dilakukan oleh remaja bahkan orang dewasa sekalipun.

Apalagi dalam agama islam, prostitusi merupakan salah satu perbuatan zina yang hukumnya haram dan termasuk kategori dosa besar.

Meski demikian perbuatan zina masih saja ada, Tetapi perbuatan seorang wanita untuk melacurkan diri bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang tertulis, tetapi bila kita sadari bahwa prostitusi adalah penyakit masyarakat yang menimbulkan akibat negatif dalam pergaulan sosial. Hal tersebut

dipengaruhi juga oleh kultur budaya bangsa Indonesia yang menganggap prostitusi sebagai perbuatan yang melanggar nilai – nilai agama dan kesusilaan. Oleh karena itu masalah prostitusi memerlukan penanganan yang lebih serius untuk mencegah tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat yang selama ini sering terjadi.

Betapapun prostitusi harus ditanggulangi karena dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan kehidupan masyarakat, seperti timbulnya berbagai kriminalitas dan penyakit kelamin yang dapat dengan mudah ditularkan kepada anak dan istri.

Oleh karena itu penyakit kelamin sangat mempengaruhi kesejahteraan sebagai anggota masyarakat, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani maupun rohani didalam kehidupan bersama.

Prostitusi adalah gejala sosial yang tumbuh dan berkembang sejak lama dan salah satu dari sekian profesi tertua di dunia. Di Indonesia prostitusi sudah dikenal di hampir semua Kota besar seiring dengan perkembangan masyarakat dan merupakan bagian dari dinamika pergaulan hidup masyarakat Indonesia.

Seperti halnya Kota – Kota lain di Indonesia, Kota Makassar juga memiliki tempat – tempat yang merupakan lokasi prostitusi. Akan tetapi kebanyakan tempat – tempat prostitusi yang berada di Kota Makassar belum mendapat izin pemerintahan untuk membuka praktik prostitusi.

Dari uraian – uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan atau praktik – praktik prostitusi yang banyak sekali terjadi dalam masyarakat dapat dipandang sebagai tindakan kriminalitas dan dapat pula dipandang sebagai hal yang bukan merupakan kejahatan khususnya jika dipandang dari sudut undang – undang hukum pidana terlihat sehingga saat ini belum terdapat pasal – pasal yang mengatur mengenai prostitusi.

Sebenarnya kehadiran praktik prostitusi yang dilakukan sangat meresahkan masyarakat, hanya saja praktik itu berlanjut dan terus terbiarkan. Berdasarkan informasi yang beredar yang didukung oleh media cetak dan elektronik, maka tidak sulit bagi penulis untuk menemukan tempat – tempat prostitusi di Kota Makassar, penulis memandang perlu untuk mengkaji dan meneliti perkembangan praktik prostitusi di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok, yaitu :

1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Prostitusi di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Makassar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Prostitusi di Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Prostitusi di Kota Makassar .

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan bagi penelitian bidang yang sama pada masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan digunakan untuk melakukan upaya pencegahan (preventif) terhadap praktek prostitusi.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna menjadi bahan referensi bagi rekan – rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prostitusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Lacur /la-cur/ adalah celaka, sial, buruk laku.

Melacur /me-la-cur/ adalah menjual diri (sebagai tunasusila atau pelacur)

Malacurkan /me-la-cur-kan/ adalah membuat jadi pelacur.

Pelacur /pe-la-cur/ adalah perempuan yang melacur, wanita tunasusila, sundal.

Pelacuran /pe-la-cur-an/ adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, persundalan;~ilmiah penyelewengan yang terdapat pada dunia ilmu pengetahuan;~keagamaan persetubuhan yang dilakukan dalam rangka upacara ritual yang keramat.

Pelacur adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang didalamnya terlihat beberapa orang dalam suatu peristiwa.

Kata pelacur identik dengan kata prostitusi, yang berasal dari kata "prostitusi" yang dapat diartikan sebagai perilaku yang terang – terangan menyerahkan diri untuk melakukan hubungan seksual.

Menurut Andini (Alam, A. S 1984 : 14) memberikan pengertian sebagai berikut :

Pelacur adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya.

Menurut Iwan Bloch (Soedjono Dirdjosisworo 1977 : 16) merumuskan sebagai berikut :

Pelacur adalah penyerahan diri secara baniyah seorang wanita untuk memuaskan laki – laki siapapun yang menginginkannya dengan pembayaran.

Bila melihat beberapa rumusan tentang pelacuran tersebut maka dapat dilihat beberapa unsur penting :

1. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita.
2. Menyerahkan diri kepada banyak laki – laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya dan
3. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki – laki kepada wanita.

Penyerahan diri wanita tertentu untuk memperoleh sejumlah uang, sehingga merupakan suatu pencahariannya sehingga kerap kali dikatakan pelacur adalah wanita.

Untuk mengetahui pengertian pelacur lebih jelasnya, maka berikutnya ini penulis mengetengahkan beberapa definisi pelacuran.

Menurut Simanjuntak (1981 : 25) berpendapat bahwa:

Pelacur adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut.

Beranjak dari beberapa definisi tentang pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki – laki dengan imbalan benda – benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu – nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

B. Sejarah Singkat Perkembangan Prostitusi Di Indonesia

Sejarah perkembangan prostitusi di Indonesia terbagi atas tiga tahap perkembangan, yang pertama adalah perkembangan prostitusi pada masa kerajaan, diikuti dengan perkembangan prostitusi pada zaman penjajahan dan perkembangan prostitusi setelah indonesia merdeka.

1. Perkembangan Prostitusi Pada Masa Kerajaan

Asal mula prostitusi modern di Indonesia dapat di telusuri kembali hingga kemasa kerajaan jawa dimana perdagangan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintah feudal. Dua kerajaan yang sangat lama berkuasa di jawa berdiri pada tahun 1755 ketika kerajaan Mataram terbagi dua menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Jogjakarta. Mataram merupakan kerajaan islam jawa yang terletak di sebelah selatan jawa tengah. Pada masa konsep

kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia (binatara). Kekuasaan raja Mataram sangat besar, mereka dianggap menguasai segalanya, tidak hanya tanah dan harta benda, tapi juga nyawa hamba sahaja mereka. Anggapan ini apabila dikaitkan dengan eksistensi perempuan saat itu mempunyai arti sendiri.

Kekuasaan raja yang tidak terbatas ini mencerminkan dan banyaknya selir yang memilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagai lagi persembahan dari kerajaan lain, dan ada juga selir yang berada di lingkungan dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana.

Sebagai selir raja ini dapat meningkatkan statunya karena anak – anak raja. Perempuan yang menjadi selir tersebut berasal dari daerah tertentu yang terkenal banyak mempunyai perempuan cantik dan memikat. Dari hasil penelitian Koentjoro (Terence. Hull 1997 : 2) mengidentifikasi 11 Kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan, dan sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai sumber wanita pelacur untuk daerah kota.

Daerah – daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Karawang dan Kuningan di Jawa Barat, Pati, Jepara, Grobogan dan Wanogiri di Jawa Tengah, serta Blitar, Malang, Bayuwangi dan Lamongan di Jawa

Timur. Kecamatan Gabus Wetan di Indramayu terkenal sebagai sumber pelacur dan menurut sejarah daerah ini merupakan salah satu sumber perempuan muda untuk di kirim ke istana Cirebon sebagai selir.

Makin banyak selir yang dipelihara, bertambah kuat posisi raja di mata masyarakat. Dari sisi ketangguhan fisik, mengambil banyak selir berarti mempercepat proses reproduksi kekuasaan para raja dan kaum bangsawan dalam masyarakat yang mempunyai selir. Oleh sebab itu, status perempuan pada zaman masa kerajaan Mataram adalah sebagai upeti (barang hantaran) dan sebagai selir.

2. Perkembangan Prostitusi Selama Masa Penjajahan

Perkembangan prostitusi pada masa penjajahan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Perkembangan Prostitusi Selama Masa Penjajahan Belanda

Bentuk industri yang terorganisir berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemuas seks masyarakat eropa. Umumnya aktifitas ini berkembang di daerah sekitar pelabuhan Nusantara ini. Pemuas seks untuk para serdadu, pedagang dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke nusantara.

Situasi pada masa kolonial tersebut membuat sakit hati para perempuan Indonesia, karena telah menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan secara hukum, tidak diterima secara baik dalam masyarakat, dan dirugikan dari segi kesejahteraan sosial.

Menurut Endang Sulistyarningsih (Jones G.W, & Terence Hull 1997 : 4) menyatakan bahwa : Sekitar tahun 1600-an pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang keluarga memeluk agama Kristen memperkerjakan wanita pribumi sebagai pembantu rumah tangga dan melarang setiap orang mengundang perempuan baik – baik untuk berzinah. Pada aturan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud perempuan baik – baik. Pada tahun 1960 panti perbaikan perempuan (House of Correction for Women).

Tahun 1852 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyetujui komersialisasi industri seks tetapi dengan serangkaian aturan untuk menghindari tindakan kejahatan yang timbul akibat aktivitas prostitusi ini. Kerangka hukum tersebut masih berlaku hingga sekarang. Meskipun istilah yang digunakan berbeda tetapi telah memberikan kontribusi bagi penelaah industri seks yang berkaitan dengan karakteristik dan dialek yang digunakan saat ini. Apa yang digunakan sebagai wanita tuna susila sekarang ini, pada waktu itu disebut sebagai wanita publik menurut peraturan yang dikeluarkan tahun 1852.

Dua decade kemudian, tanggung jawab pengawasan rumah bordil dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah setempat. Berkaitan dengan aktivitas industri seks ini, penyakit kelamin merupakan persoalan yang serius dan paling menguatirkan pemerintah daerah. Tetapi terbatas tenaga medis dan terbatasnya alternatif cara pencegahan membuat upaya mengurangi penyebaran penyakit tersebut menjadi sia – sia.

Pengalihan tanggung jawab pengawasan rumah bordil ini menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan pemukiman membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat. Di surabaya misalnya, pemerintah daerah telah menetapkan tiga daerah lokalisasi di tiga desa sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas prostitusi dan penyebaran penyakit kelamin. Selain itu para perempuan penaja cinta dilarang beroperasi di luar lokalisasi tersebut.

Pada tahun 1875, Pemerintah Batavia (kini Jakarta) mengeluarkan peraturan berkenaan dengan pemeliharaan kesehatan. Peraturan tersebut menyebutkan antara lain bahwa petugas kesehatan bertanggung jawab untuk memelihara kesehatan para wanita publik. Para petugas kesehatan ini pada peringkat ke III (tidak setara dengan eselon III zaman sekarang yaitu kepala Biro pada organisasi pemerintah) mempunyai kewajiban untuk mengunjungi dan memeriksa wanita publik pada setiap hari sabtu pagi. Sedangkan para

petugas pada peringkat lebih tinggi (peringkat II) bertanggung jawab untuk mengatur wadah yang diperuntukkan bagi wanita, umumnya yang sakit dan perawatan lebih lanjut.

Berdasarkan laporan pada umumnya, meskipun telah banyak dikeluarkan peraturan, aktivitas prostitusi tetap saja meningkat secara drastis pada abad ke - 19, terutama setelah diadanya pembenahan hukum agraria pada tahun 1870, dimana pada saat itu perekonomian Negara jajahan terbuka bagi para penanam modal asing. Pertumbuhan gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pendirian perkebunan – perkembunan di Sumatera dan pembangunan jalan raya dan jalur kereta api, telah merangsang terjadinya migrasi tenaga kerja laki – laki secara besar – besaran. Sebagian dari pekerja tersebut adalah bujangan yang menciptakan pemerintah terhadap aktivitas prostitusi.

Menurut tulisan Ingleson (Endang Sulistyaningsih, 1997 : 7) menyatakan bahwa : selama pembangunan kereta api yang menghubungkan Kota – Kota di Jawa seperti Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyakarta, dan Surabaya pada tahun 1884, tidak hanya aktivitas prostitusi saja yang timbul untuk melayani para pekerja bangunan di setiap tempat – tempat penginapan dan fasilitas lainnya. Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa banyak kompleks prostitusi yang tumbuh di stasiun kereta api hampir setiap kota. Dari sekian

banyaknya aktivitas prostitusi tersebut yang terbesar adalah aktivitas prostitusi di Surabaya.

Sejarah industri seks di Surabaya sangat unik. Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, dan sebagai jalur perdangan utama di Indonesia Timur, Surabaya pada saat Penjajahan Belanda berkembang kota ini, pada abad ke - 19 Surabaya menjadi terkenal karena aktivitas prostitusinya.

Kondisi tersebut Banyak kapal barang dan kapal yang memasuki pelabuhan dengan segera dikelilingi perahu – perahu kecil berisi para pelacur setempat yang mencari pelanggan baru. Hingga pertengahan abad ke – 19 para pelacur diizinkan naik ke kapal angkatan laut dengan pertimbangan bahwa lebih baik mengawasi awak yang mempunyai aktivitas pribadi di dalam kapal daripada membiarkan mereka berkeliaran dalam kota untuk mencari perempuan penghibur tersebut.

Menurut catatan resmi sejarah Kota Surabaya, dinyatakan bahwa tahun 1964 terdapat 228 pelacur di bawah pengawasan 18 pemilik rumah bordil. Akan tetapi meragukan data jumlah pelacur tersebut. Karena dianggap terlalu sedikit, dan mungkin hanya menunjukkan banyaknya pekerja seks yang terdaftar secara resmi.

Dalam tulisannya Simons membagi konsep prostitusi di Indonesia selama masa penjajahan belanda dalam delapan kategori sebagai berikut :

1. Pelacur yang mangkal di kedai – kedai kecil sekitar pelabuhan dan kota pelabuhan itu sendiri.
2. Pelacur yang beroperasi di jalanan, berasal dari kampung – kampung setempat.
3. Rumah – rumah bordil di pusat kota milik orang Cina dan Jepang.
4. Lokalisasi rumah – rumah bordil di kampung pinggir kota.
5. Jasa pelayanan seks terselubung yang dilakukan oleh para nyonya (ibu rumah tangga).
6. Pelacur Negara Eropa yang terorganisir dilokalisasi tertentu.
7. Pelacur homo seksual dan pejalan.

b. Perkembangan Prostitusi Selama Masa Penjajahan Jepang

Komersialisasi seks di Indonesia terus berkembang selama pendudukan Jepang antara tahun 1941 hingga tahun 1945. Wanita yang telah bekerja sebagai perempuan penghibur dikumpulkan dan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, sebagian dari mereka ditempatkan di rumah – rumah bordil untuk melayani para prajurit Jepang, sementara yang lainnya tetap beroperasi di tempat lainnya.

Pada masa pendudukan Jepang, banyak perempuan dewasa dan anak – anak sekolah yang tertipu atau dipaksa memasuki dunia prostitusi. Bangsa Jepang menawarkan pendidikan dan kehidupan yang baik di Tokyo atau di kota – kota besar di Indonesia lainnya kepada sejumlah pelajar perempuan. Banyak calon yang berparas

menarik dan cerdas dari keluarga kalangan atas untuk mencoba tawaran pihak Jepang ini.

Kondisi para perempuan pekerja seks selama masa penjajahan Belanda sangat berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi kelompok yang sama zaman Jepang. Sebuah dokumen yang dikumpulkan majalah mingguan tempo menyebutkan bahwa perempuan yang menjadi pelacur pada kedua masa penjajahan itu, umumnya lebih menyukai kehidupan yang tentram pada masa penjajahan Belanda, karena pada masa banyak sinjo yang memberi mereka hadiah berupa pakaian, perhiasan bahkan tempat tinggal. Sebaliknya pada masa pendudukan Jepang pekerjaan mereka terasa sulit.

3. Perkembangan Prostitusi Setelah Indonesia Merdeka

Pada akhir tahun 1940-an, penduduk Indonesia yang baru merdeka terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Pada tahun 1950-an situasi perekonomian Indonesia ditandai dengan banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Umumnya rumah tangga di pedesaan mengandalkan kehidupan dari berbagai sumber pendapatan. Strategi untuk dapat bertahan hidup bagi rumah tangga di pedesaan terutama bagi keluarga untuk bekerja di luar sektor pertanian, paling tidak sebagai pekerja paruh waktu. Karena terbatasnya kesempatan kerja dan persaingan yang ketat di

daerah pedesaan, banyak perempuan muda dari keluarga miskin yang bermigrasi ke kota.

Pada tahun 1950-an dan di awal 1970-an, besarnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota meningkatkan jumlah tenaga kerja wanita yang mencari pekerjaan sebagai pekerjaan upahan di sektor formal. Peningkatan jumlah pendudukan wanita yang bermigrasi ke kota – kota besar menyebabkan persaingan di antara mereka, dan persaingan dengan tenaga laki – laki. Kebanyakan para wanita yang melakukan migrasi itu masih muda, tidak berpengalaman, tingkat pendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas. Oleh sebab itu kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan rendah dan penghasilan yang rendah pula. Jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok ini adalah pekerja sektor informal, sebagai pedagang kecil, pembantu rumah tangga dan sebagai pelacur (WTS).

Menurut faktor lain yang mendorong para wanita muda masuk ke dunia prostitusi adalah tingginya angka tingkat perceraian terutama dikalangan keluarga jawa. Pada tahun 1950-an, tingkat perceraian di jawa barat mencapai angka tertinggi di dunia, Jawa Timur dan Jawa Tengah lebih rendah.

Industri seks di Indonesia menjadi semakin rumit bersamaan dengan meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup, pendapatan masyarakat dan tantangan yang dihadapi, hingga kini lokasi tempat kerja industri seks yaitu kompleks prostitusi, tempat perempuan

panggilannya, panti pijat, semakin berkembang dan banyak ditemukan di Kota – Kota di Indonesia.

c. Cara Melakukan Prostitusi

Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus operandi di WTS (wanita tuna susila) dan WTS dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon, dan ada yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi.

Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung.

Pengklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan prostitusi baik pembinaan mental maupun spriritual, seperti pelayanan kesehatan, disamping itu juga memudahkan penulis untuk mengidentifikasikan jumlah prostitusi.

1. Prostitusi Jalanan

Prostitusi yang termasuk dalam kegiatan prostitusi ini sering disebut dalam bahasa asing *prostitution*. Kegiatan prostitusi ini dalam bahasa asing *streetwalker prostitution*. Kegiatan prostitusi ini banyak dijumpai di Ibukota Provinsi di Indonesia. Para WTS pada kegiatan ini sering

berdiri menunggu laki – laki atau tamu di pinggiran jalan tertentu, terutama pada malam hari. Biasanya para WTS semacam ini dengan mudah dapat dikenal, hal itu dapat dilihat dari tingkah lakunya yang dapat diperlihatkannya. Para WTS ini umumnya berada di tempat remang – remang sambil menunggu laki – laki atau pasangan kencannya.

Para pelacur jalanan atau WTS biasanya memiliki keberanian dengan tidak segan – segan mengusik atau menggoda laki – laki yang lewat di depannya, atau member tanda – tanda misalnya melambaikan tangannya, mengkedipkan salah satu matanya dan gerakan lain yang dapat menarik perhatian laki – laki yang lewat .

Pada umumnya, pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki – laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Kalau ditinjau dari segi ekonomi, maka WTS semacam ini umumnya dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka rela memberikan pelayanan seksual kepada setiap laki – laki yang membutuhkannya. Oleh karena itu hubungan seksual dengan kegiatannya prostitusi jalanan ini akan berisiko terhadap kesehatan, ini disebabkan mereka jarang, ataupun

tidak pernah sama sekali memeriksa kesehatannya khususnya alat kelamin yang mungkin mendatangkan penyakit.

Para pelacur jalanan tidak terikat pada seorang geromo, mereka mendapatkan keuntungan dan seksual itu hanya untuk diri sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi para pelacur jalanan mendapatkan perlindungan dari seorang atau beberapa orang laki – laki bagi keselamatan mereka dari laki –laki yang berlaku kasar atau tidak bersedia membayar. Untuk urusan tersebut para pelacur jalanan bersedia membagi penghasilan mereka dengan laki – laki yang memberikan perlindungan tersebut.

2. Prostitusi Panggilan

Prostitusi ini sering disebut call girl. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, Menajer, mamasan atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi.

Salah satu ciri khas dari prostitusi panggilan, biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat – tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah – ubah. Pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, adakalanya dilakukan di hotel – hotel, tempat rekreasi atau pegunungan.

Bila dibandingkan dengan prostitusi jalanan, prostitusi panggilan ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan

ribu untuk short time. Penghasilan yang di peroleh dari pelayanan seksual tersebut, dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun mucikari.

3. Prostitusi Rumah Bordil

Prostitusi rumah bordil Yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur dapat dijumpai di tempat – tempat tertentu, berupa rumah – rumah yang dinamakan bordil, yang mana umumnya di tiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari/germo.

Sering di sebut bahwa jenis prostitusi yang berbentuk rumah bordil, mempunyai fungsi sosial karena memberikan lapangan kerja pada berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang cuci pakaian, penjual obat, dan usaha – usaha lainnya, yang mendapat keuntungan dengan adanya rumah bordil tersebut.

4. Prostitusi Terselubung

Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebut, karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja illegal, dan bukan tak pernah mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bias juga melalui perantara (mucikari/germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bias juga melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja sendirian. Ada tangan – tangan kuat yang mengatur kerja mereka.

Dalam bukunya Prostitusi Terselubung Anita (Ashadi Siregar 1983 : 100) membagi jenis prostitusi berdasarkan besarnya proporsi pembayaran, yang dapat dibedakan dalam beberapa segmen, yakni segmen pelacur kelas rendah, segmen pelacur kelas menengah, segmen pelacur kelas atas dan segmen pelacur kelas tinggi.

1. Segmen Pelacur Kelas Rendah

Menurut (Krisna, Lerman, & Yoedha 1983 : 93-101) mengungkapkan bahwa : beberapa perusahaan yang melayani para pelanggan kelas rendah adalah kompleks prostitusi Premil, Jarak, Bangunrejo, Tondes di Surabaya. Dewi sartika di Bandung. Encim Jengkrik dan Bokir di Cianjur Jakarta. Tarif penggunaan short - time dilokasi – lokasi tersebut rata – rata Rp. 5.000,00. Fasilitas yang disediakan di kompleks ini sangat minim.

Pada industri seks yang terorganisir tarif pelayanan seks terendah ditawarkan oleh pelacur jalanan, pelacur yang beroperasi di kawasan kumuh, di pasar dan di lokasi lain yang sulit dijangkau bahkan kadang – kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para pelacur tersebut.

2. Segmen Pelacur Kelas Menengah

Sektor pelacur kelas menengah mempunyai tarif yang lebih tinggi, mereka ini termasuk pelacur yang bertarif Rp. 25.000,00 – Rp. 75.000,00 per transaksi.

Menurut Bambang Poernomo dan Siregar pelacur yang beroperasi di Kompleks Dolly Surabaya, Sariten di Bandung dan Kramat Tunggak Jakarta dikategorikan ke dalam pelacur kelas menengah. Lebih lanjut hasil penelitian (Yoedha, 1983 : 55) bahwa panti pijat Surabaya menetapkan tariff Rp. 30.000,00 – Rp. 60.000,00. Panti pijat di Bandung dan Jakarta menetapkan tarif yang serupa, misalnya : Rp. 70.000,00 untuk pelayanan “all – in”, atau ditambah Rp. 50.000,00 atau Rp. 20.000,00 untuk sewa kamar (yang seringkali harga kamar ini dikenakan secara terpisah).

3. Segmen Pelacur Kelas Atas

Di Indonesia pelanggan dan kelompok masyarakat dengan penghasilan relatif tinggi kebanyakan menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak – kontak khusus yang hanya menerima klien tertentu. Untuk setiap transaksi para pelanggan harus membayar harga yang relatif mahal yaitu Rp. 100.000,00 – Rp. 300.000,00. Jumlah ini akan berlipat dua kali melakukan booking untuk semalaman.

Harga serupa juga ditemukan di panti – panti pijat yang sangat mahal. Pada sebagian besar usaha penyedia layanan seks, tarif ditentukan menurut usia dan daya tarik secara fisik si pekerja seks. Kebanyakan usaha – usaha pelayanan seks ini mempunyai seorang

yang ditonjolkan biasa disebut “primadona” ia mempunyai tarif lebih tinggi dibandingkan dengan para pelacur lainnya.

d. Jenis – Jenis Prostitusi

(Ayu, 2011) mengemukakan bahwa menurut aktivitas prostitusi terbagi menjadi dua jenis antara lain :

1. Prostitusi yang terdaftar

Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan keamanan umum. Pelakunya diawasi oleh kepolisian yang bekerjasama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Namun kenyataan cara ini tidak efisien karena kenyataannya tidak adanya kerja sama antara pelacur dengan petugas kesehatan.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi

Mereka yang melakukan prostitusi secara gelap – gelap dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi dan tempatnyapun tidak tertentu. Sehingga kesehatannya sangat dirugikan.

e. Pengertian Mucikari / Germo

Germo yang sehari – harinya disebut dengan panggilan mimmie, tante atau bos adalah yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya, menampung dan pekerjaan wanita tuna susila dengan menyediakan kamar dan rumah – rumah khusus buat mereka. Dengan demikian mucikari atau germo adalah salah satu unsur penting didalam tindakan prostitusi, ini yang mendorong terselenggaranya praktik – praktik prostitusi. Untuk pekerja ini germo mengambil sebagian besar dari hasil yang diperoleh pelacur dari langganannya.

Untuk disebut sebagai germo menurut Pasal 296 KUHP, sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencahariannya atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.

Sedangkan Pasal 297 KUHP, menyatakan sebagai berikut :

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki – laki yang belum cukup umur dipidana penjara selama – lamanya enam tahun.

f. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Dan Upaya Penanggulangannya.

Secara teoritis faktor pendorong terjadinya kejahatan, berdasarkan beberapa teori dari kriminologis, antara lain :

Menurut Bonger (2004 : 31) bahwa :

Penyebab Terjadinya Prostitusi muncul karena masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab – sebab kejahatan adalah dimasyarakat itu berbeda – beda yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewarisan tetapi dipelajari dalam pergaulan masyarakat. Sebetulnya ada kekayaan dan ada kemiskinan itu yang menyebabkan bahaya besar pada jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi keadaan jiwa manusia dalam hidupnya seperti orang miskin akan merasa rendah sendiri dalam masyarakat sehingga mereka menempuh jalan untuk mengimbangi keadaan, salah satu jalan adalah timbulnya hasrat jahat, sebaiknya orang kaya hidup tanpa banyak bekerja, kondisi semacam ini membuat seorang berlaku jahat, terutama miskin.

Menurut Hari Saherodji (2006 : 45) menyatakan bahwa : kemiskinan yang membuat seseorang melakukan penyimpangan, misalnya seseorang wanita menjadi prostitusi karena untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya atau keluarganya. Kemiskinan ini disebabkan karena tidak adanya pekerjaan atau mempunyai pekerjaan tetapi gajinya atau pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya atau keluarganya.

Berdasarkan beberapa teori mengenai faktor terjadinya kejahatan tersebut, berikut ini dikemukakan faktor terjadinya prostitusi. Didalam penelusuran aktivitas orang yang cenderung menjadi wanita prostitusi, penulis mengutip beberapa pendapat dari pakar hukum, antara lain :

Menurut Simanjuntak (1981 : 40) menyebutkan faktor ekonomi seorang wanita itu melacurkan diri atau menjadi wanita pekerja seks komersial :

1. Seorang wanita yang terdesak oleh kesukaran ekonomi sering mengambil jalan prostitusi, biaya sekolah sangat tinggi, tidak adanya lapangan pekerjaan.
2. Seorang janda dengan beberapa anaknya yang terlantar, mereka untuk menghidupi anak – anaknya, menjual diri dianggap sebagai satu – satunya jalan yang termudah memperbaiki keadaan ekonomi yang terburuk.

Menurut Rukmini Kusuma (1984 : 35) berpendapat bahwa :

Faktor moral individu dan moral masyarakat sebagai faktor yang cukup penting artinya di dalam terjadinya pelacuran.

Recless menyebutkan kalau sejumlah kondisi special ekonomis yang amat artinya dalam menjerumuskan seorang wanita melacurkan diri, sebagai berikut :

- a. Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di daerah terpencil.
- b. Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota besar, diantara mereka ada sedang hamil tanpa suami.
- c. Pada umumnya mereka memiliki keahlian tertentu.
- d. Berasal dari keluarga pecah (*Broken Home*)
- e. Telah diceraikan oleh suami mereka dan
- f. Jatuh ke tangan agen – agen rumah bordil yang sedang giat mencari mangsa – mangsa baru untuk dijadikan penghuni tetap rumah – rumah pelacuran.

Adanya inspirasi yang tinggi pada diri di wanita dan kesenangan terhadap pakaian – pakaian yang serba Lux, perhiasan mewah, ingin hidup bermewah – mewah, namun kebutuhan ekonominya tidak mampu menutupinya, sehingga mereka akan membawa dirinya ketepi jurang prostitusi untuk menutupi kebutuhan sehari – hari.

Ada dua tindakan atau upaya menanggulangi pelaku seks komersial yaitu secara Preventif dan Represif.

Menurut Sudarsono (1992 : 400) menyatakan bahwa :

1. Secara Represif, yang antara lain :

- a. Merealisasikan ketentuan hukum pidana terhadap pelanggannya.

- b. Tindakan pengawasan, pengaturan dan pencegahan penyakit yang ditimbulkan karena praktek prostitusi.
- c. Menekan, menghapus, dan menindas serta usaha penyembuhan terhadap para pelaku praktik prostitusi untuk dibawa ke jalan yang benar.

2. Secara Preventif, yang antara lain :

- a. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
- b. Penyuluhan bahaya penyakit yang diakibatkan oleh praktik prostitusi.

Adanya ketegasan dan penyempurnaan atas undang-undang ataupun peraturan yang mengatur dan melarang masalah penyelenggaraan praktik prostitusi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa di Kota Makassar terdapat banyak tempat – tempat prostitusi baik yang terselubung maupun yang nampak seperti jalan sumba khususnya di Hotel Virgo. Pemilihan Hotel Virgo sebagai lokasi penelitian disebabkan karena alasan kuantitas (jumlah) para pelacur yang dipandang sebagai barometer intensitas praktek prostitusi di Kota Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sasaran penelitian, dimana penulis menggunakan wawancara langsung dengan para pelacur untuk mendapatkan informasi dan data.
2. Data sekunder, yaitu : data yang didapatkan berdasarkan telaah pustaka dan literatur serta bahan – bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Wawancara (interview), yaitu Tanya jawab antara penulis dengan para pelacur untuk memperoleh keterangan, informasi, dan sejenisnya. Dalam interview ini dilakukan wawancara dengan para pelacur yang melakukan prostitusi.
- b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala yang nampak di lokasi penelitian yang berguna sebagai bahan kajian untuk dikaji dan dibahas sesuai dengan rujukan teori dan peraturan perundangan. Dalam observasi ini penulis melakukan peninjauan dan pengamatan langsung ke lokasi – lokasi yang disinyalir praktek – praktek prostitusi seperti klub hiburan malam, hotel – hotel maupun café – café.

D. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan disusun secara sistematis dan terperinci. Sedangkan data primer yang diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan berupa wawancara selanjutnya dicatat secara sistematis kemudian dilakukan analisis kuantitatif, kemudian dilakukan pemaparan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Empiris Praktik Prostitusi Di Kota Makassar

untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat perkembangan prostitusi, yaitu dari tahun 2010 sampai 2014 di Kota Makassar, dan faktor-faktor mempengaruhi timbulnya prostitusi, dan upaya penanggulangannya, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan suatu data dan analisis yang dapat menggambarkan dan menguraikan eksistensi dari praktik prostitusi di Kota Makassar.

Adapun data-data mengenai praktik prostitusi dalam kurung waktu antara tahun 2010 sampai dengan 2014 di Kota Makassar.

1. Data Hotel Virgo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Hotel Virgo Kota Makassar maka dapat diketahui tentang beberapa daerah asal pelaku prostitusi, usia pelaku prostitusi, status perkawinan pelaku prostitusi, tingkat pendidikan pelaku prostitusi, dan faktor penyebab terjadinya prostitusi di Hotel Virgo Kota Makassar.

Tabel I

Daerah Asal Pelaku Prostitusi Di Hotel Virgo Kota Makassar

No	Daerah Asal	Jumlah	%
1	Surabaya	41	33,60
2	Madura	27	22,13
3	Malang	19	15,57
4	Kediri	14	11,47
5	Manado	9	7,37
6	Kendari	7	5,73
7	Yogyakarta	5	4,09
	Jumlah	122	100%

Sumber Data : Hotel Virgo 2010-2014

Dari tabel tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa jumlah pelacur paling banyak di Hotel Virgo berasal dari Surabaya yakni 41 orang (33,60%) sedangkan dari Madura sebanyak 27 orang (22,13%), diikuti dari daerah Malang 19 orang (15,57%), Kediri 14 orang (11,47%), Manado 9 orang (7,37%), Kendari 7 orang (5,73%), dan Yogyakarta 5 orang (4,09%).

Angka tersebut di atas meningkat drastis bila dibandingkan sebelum krisis moneter yakni pada tahun 1996 hanya berjumlah 93 orang dan pada tahun 1999, 63 orang.

a. Usia Para Pelacur

Salah satu langkah untuk memperdalam mengenai perkembangan praktik prostitusi adalah mengetahui usia dari para pelacur. Hal tersebut penting artinya mengingat umur (usia) berpengaruh pada perilaku seseorang untuk melakukan kecenderungan tertentu, termasuk kecenderungan seorang perempuan untuk melacurkan diri.

Tabel II

Usia Pelaku Prostitusi Di Hotel Virgo Kota Makassar

No	Usia	Jumlah	%
1	15-20 Tahun	51	42.0
2	21-25 Tahun	39	32.06
3	26-36 Tahun	19	15.57
4	36-40 Tahun	13	10.65
5	41 Tahun ke atas	-	-
	Jumlah	122	100%

Sumber Data : Hotel Virgo 2010-201.

Berdasarkan data pada tabel II di atas, menunjukkan bahwa usia 15-20 Tahun dan 21-25 Tahun paling banyak menempati Hotel Virgo dengan jumlah 51 orang (41,0%) yang berusia 15-20 Tahun dan 39 orang (32,06%) yang berusia 21-25 Tahun. Sedangkan yang berusia

26-36 Tahun berjumlah 19 orang (15,57%) dan yang paling sedikit usia 36-40 Tahun, berjumlah 13 orang (10,65%).

Menurut hasil wawancara penulis dengan pengusaha Hotel Virgo, umumnya mereka bersedia menerima wanita yang relatif muda, karena di samping dapat menarik minat para laki-laki, juga para pelacur dapat bertahan lama menjadi pelacur di Hotel Virgo.

b. Status Perkawinan Para Pelacur

Status perkawinan seorang wanita berpengaruh pada tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan perilaku seksual. Tindakan seorang wanita yang terkait pada perkawinan sah, berbeda dengan tindakan seorang wanita yang belum terikat pada perkawinan. Begitu pula halnya tindakan seseorang wanita masuk ke lingkungan prostitusi banyak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu, salah satunya keterikatan pada perkawinan dengan suami yang sah. Secara psikologis seorang wanita yang terikat pada perkawinan akan sulit untuk masuk ke lingkungan prostitusi, kecuali karena keadaan yang memaksa. Dalam konteks tersebut perkawinan dapat dijadikan sebagai sandarac moral.

Tabel III
Status Perkawinan Pelaku Prostitusi Di Hotel Virgo
Kota Makassar

No	Status Perkawinan	Jumlah	%
1	Belum Menikah	44	36.06%
2	Janda	76	62.3%
3	Masih Terikat Pada Perkawinan	2	1.6%
		122	100%

Sumber Data : Hotel Virgo 2010-2014

Pada umumnya para pelacur yang menempati Hotel Virgo sudah menjanda 76 orang dan belum menikah. Mereka dikategorikan tidak terikat perkawinan, selebihnya terdapat pelacur yang terikat pada perkawinan yang sah berjumlah 2 orang (1,6%).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelacur yang berstatus janda, diketahui bahwa mereka terjun ke lingkungan prostitusi setelah bercerai dengan suami mereka dari perkawinan yang sah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan seksual, mereka bersedia menjadi pelacur (WTS).

Berbeda dengan yang berstatus janda, Noni (bukan nama sebenarnya) mengaku bahwa ia masih terikat dengan perkawinan

denan suaminya di Surabaya. Hanya saja suaminya belum mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan di Kota Makassar. Noni suda menjadi WTS selama 3 bulan di Hotel Virgo, sebelumnya ia bekerja di salah satu supermarket di Kota Makassar.

c. Tingkat Pendidikan Para Pelacur

Pendidikan terbagi atas dua golongan, yaitu golongan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan dalam keluarga dan pendidikan agama. Sedangkan pendidikan formal adalah pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah. Kedua bentuk pendidikan di atas mempunyai manfaat yang besar untuk mengubah perilaku dan cara bertindak seseorang.

Tingkat pendidikan pada lembaga pendidikan formal yang dimiliki seseorang dapat menjadi ukuran untuk menilai cara pandangan dan pemahaman orang terhadap sesuatu hal. Pemahaman seseorang yang berpendidikan SD dengan yang berpendidikan Sarjana dalam hal tertentu jelas berbeda. Termasuk tindakan seseorang untuk melacurkan diri banyak dipengaruhi sejauh mana pemahamannya akan tindakan dan pemahaman itu tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Tabel IV
Tingkat Pendidikan Pelaku Prostitusi Di Hotel Virgo
Kota Makassar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	74	60.65
2	SLTP	30	24.59
3	SLTA	18	14.76
4	Perguruan Tinggi	-	-
		122	100%

Sumber Data : Hotel Virgo 2010-2014

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar para pelacur yang mendiami Hotel Virgo berpendidikan SD 74 orang (60,65%), selanjutnya yang berpendidikan SLTP sebanyak 30 orang (24,59%), selebihnya semua mereka yang berpendidikan SLTA sebanyak 18 orang (14,76%).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa yang paling banyak terjun di dunia prostitusi yaitu mereka yang berpendidikan rendah, karena pemikirannya masih minim atau kurang.

B. Faktor Penyebab Praktik Prostitusi Di Kota Makassar

Berbicara mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya praktik prostitusi adalah sangat kompleks sifatnya, masalahnya terletak pada luasnya gerak dan ruang lingkup kehidupan manusia yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu dan lainnya, sehingga faktor-faktor yang menyebabkan tindakan praktik prostitusi tersebut tidak ada yang berlaku secara umum untuk jenis praktik prostitusi yang sama seperti keadaan lingkungan, keadaan geografis dan sebagainya.

Hal ini juga terjadi pada kasus praktik prostitusi, dimana pada dasarnya kecenderungan pelaku untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dipengaruhi dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang berbeda. Keadaan ini disebabkan karena sifat dan kepentingan yang pada saat itu tidak sama antara pelaku satu dengan pelaku yang lainnya.

Berikut ini akan di bahas faktor-faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi di Kota Makassar.

1. Faktor Ekonomi

Sebagai gambaran pengaruh faktor ekonomi terhadap timbulnya praktik prostitusi, misalnya pada perkembangan perekonomian di abad modern ini, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas yang menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya, ditambah pergeseran nilai dengan adanya jiwa-jiwa materialisme. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan

untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya, sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara, misalnya dengan melakukan prostitusi.

2. Faktor Lingkungan

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Kepribadian seseorang senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan keluarga tempat ia dibesarkan.

Peranan keluarga dalam menentukan pola-pola tingkah laku anak-anak sebelum dewasa maupun sesudahnya penting sekali untuk perkembangan selanjutnya. Oleh karena tidak seorangpun pada saat dilahirkan telah mantap tabiatnya sebagai seorang yang patuh terhadap norma-norma hukum, tetapi keluargalah merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, juga dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari seperti tempat dimana seseorang tinggal dan berinteraksi dengan orang lain. Lingkungan pergaulan memegang peranan penting dalam pembentukan etika serta tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Ini disebabkan karena memang pada dasarnya suatu lingkungan pergaulan tertentu akan membentuk dan menghasilkan norma-norma tertentu. Namun demikian lingkungan pergaulan tersebut tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidikan dan

perkembangan diri seseorang. Lingkungan adakalanya dihuni oleh orang-orang dewasa serta anak-anak muda dan anti sosial yang bisa memberi pengaruh buruk bagi orang-orang disekitarnya terutama bagi mereka yang masih labil jiwanya.

3. Faktor Sakit Hati

Hal ini sering terjadi kepada pasangan muda yang telah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan lalu ditinggalkan begitu saja dan akhirnya dia memilih jalan untuk menjadi seorang pelaku prostitusi

Untuk lebih jelas faktor penyebab terjadinya prostitusi di Hotel Virgo Kota Makassar dapat dilihat pada table V berikut ini.

Tabel V
Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Di Hotel Virgo
Kota Makassar

No	Faktor Penyebab	Jumlah	%
1	Masalah Ekonomi	52	50.3
2	Lingkungan Sosial	50	38.5
3	Sakit Hati	20	12.2
	Jumlah	122	100%

Sumber Data : Hotel Virgo 2010-2014

Pada umumnya para pelacur yang terjun ke dunia prostitusi, karena masalah ekonomi dengan jumlah 52 orang (50,3%). Sedangkan yang memiliki lingkungan sosial berjumlah 50 orang (38,5%), dan ada juga

yang memiliki masalah lantaran sakit hati karena di tinggal oleh suaminya atau di ceraikan, dengan jumlah 20 orang (12,2%).

C. Upaya Penanggulangan Praktik Prostitusi Di Kota Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ekawati Puspita sari pada tanggal 7 mei 2015 dijelaskan bahwa upaya penaggulangan praktik prostitusi di Dinas sosial Kota Makassar terbagi atas dua bagian penting, yaitu :

1. Upaya preventif
2. Upaya represif

Untuk lebih memahaminya, akan dijelaskan satu persatu.

1. **Upaya preventif** adalah suatu upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan praktik prostitusi pertama kali. Dan usaha ini selalu diutamakan. Adapun upaya preventif yang dilakukan Dinas Sosial dan Kepolisian adalah sebagai berikut :
 - a. Mengadakan penyuluhan bahaya penyakit yang diakibatkan oleh para pelaku prostitusi di Dinas Sosial.
 - b. Memberi penjelasan terhadap pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk meningkatkan keimanan terhadap nilai-nilai agama dan moral agar para pelaku bisa sadar akan kelakuan yang ia jalani salah dan melanggar norma-norma agama.

- c. Memberikan kegiatan-kegiatan positif agar mendapatkan kesibukan sehingga mereka bisa terhindar dari lingkungan prostitusinya.
- d. Mengadakan patroli keliling pada daerah-daerah yang sering di tempai prostitusi.
- e. Penempatan anggota kepolisian yang berseragam di tempat-tempat yang memang telah di curigai tempat berkumpulnya para yang melakukan prostitusi.

2. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya praktik prostitusi.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. mengadakan tindakan pengawasan, pengaturan dan pencegahan penyakit ditimbulkan karena praktik prostitusi.
- b. Memberikan saran untuk penyembuhan terhadap para pelaku praktik prostitusi untuk di bawa ke jalan yang benar.
- c. Pihak kepolisian melakukan cara penerapan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku prostitusi sampai kemudian di serahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kota Makassar.
 - a. Faktor ekonomi ketika tumbuh persaingan bebas antara yang menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya, ditambah pergeseran nilai dengan adanya jiwa-jiwa materialisme, hal ini cenderung menimbulkan keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya, sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara, misalnya dengan melakukan prostitusi.
 - b. Faktor lingkungan di pengaruhi oleh pergaulan sehari-hari seperti tempat dimana seseorang tinggal melihat keadaan sekitar dan teman-temannya melakukan prostitusi dan akhirnya dia juga ikut-ikutan terjebak dalam praktik prostitusi.
 - c. Faktor sakit hati terjadi kepada pasangan muda yang telah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan lalu ditinggalkan begitu saja dan akhirnya dia memilih jalan untuk menjadi seorang pelaku prostitusi.

- Penempatan anggota kepolisian yang bersegera di tempat-tempat yang memang telah di curigai tempat berkumpulnya para pelaku prostitusi.
- b. Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya praktik prostitusi.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan kepolisian adalah sebagai berikut :

- mengadakan tindakan pengawasan, pengaturan dan pencegahan penyakit ditimbulkan karena praktik prostitusi.
- Memberikan saran untuk penyembuhan terhadap para pelaku praktik prostitusi untuk di bawa ke jalan yang benar.
- Pihak kepolisian melakukan cara penerapan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku prostitusi sampai kemudian di serahkan kepada pihak yang berwajib.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Kepolisian adalah sebagai berikut :

a. Upaya preventif

Upaya preventif adalah suatu upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan praktik prostitusi pertama kali. Dan usaha ini selalu diutamakan.

Adapun upaya preventif yang dilakukan Dinas Sosial dan Kepolisian adalah sebagai berikut :

- Mengadakan penyuluhan bahaya penyakit yang diakibatkan oleh para pelaku prostitusi di Dinas Sosial.
- Memberi penjelasan terhadap pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk meningkatkan keimanan terhadap nilai-nilai agama dan moral agar para pelaku bisa sadar akan kelakuan yang ia jalani salah dan melanggar norma-norma agama.
- Memberikan kegiatan-kegiatan positif agar mendapatkan kesibukan sehingga mereka bisa terhindar dari lingkungan prostitusinya.
- Mengadakan patroli keliling pada daerah-daerah yang sering di tempati prostitusi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan dalam mengambil langkah untuk mengurangi atau menekan lajunya perkembangan praktik prostitusi, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi atau menekan munculnya pelacuran, dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang harus mengatur secara jelas dan tegas tentang praktik pelacuran.
2. Aparat penegak hokum harus berani dan tegas dalam menanggulangi pelacuran sehingga tidak ada oknum-oknum yang berani terlibat dalam praktik-praktik pelacuran.
3. Sebagaimana diketahui bahwa prostitusi di Kota Makassar mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah tempat / lokasi prostitusi, maupun jumlah pelacur itu sendiri, oleh karena itu perlu adanya lokalisasi prostitusi yang resmi yang jauh dari pemukiman penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A .S (1984). Pelacuran dan Pemerasan Sosiologi Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia. Alumni Bandung.

Bonger (2004). Pengantar Kriminologis. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Endang Sulistyaningsih (1997). Sejarah dan Perkembangan Prostitusi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hari Saherodji (2006). Pokok-pokok Kriminologis. Jakarta: Aksara Baru.

Kartini Kartono (1983). Patologi Sosial Jilid 1. Bandung: Rajawali Pers.

Krisna, Lerman, Yoedha (1983). Menyusuri Remang-remang Jakarta. Jakarta: Sinar Harapan.

Rukmini Kusuma (1984). Proses Terjadinya Pelacuran di Makassar. Jakarta: Sosiologi. UGM.

Sudarsono (1992). Asas-asas Kriminologis. Alumni Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo (1977). Pelacuran di Tinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat. Bandung: PT. Karya Nusantara.

Internet :

<http://ayu.blog.fisip.uns.ac.id/2011/02/25/prostitusi>.

<http://kbbi.web.id/lacur>.

CV. HOTEL VIRGO
JALAN SUMBA 109, PATTUNUANG
TELEPHONE 554-243 MAKASSAR 90174

Makassar 7 Mei 2015

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Manager Hotel Virgo Makassar, menerangkan bahwa :

Nama : IRMA PEBRIANTI
Tempat/ Tgl Lahir : Ujung Pandang 25 Februari 1994
Fakultas/ Program Study : Fakultas Hukum
Mahasiswa : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

Telah mengadakan penelitian pada Hotel Virgo Makassar dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI DI KOTA MAKASSAR (2010-2014) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MANAGER HOTEL VIRGO



CANDRA BAGUS SETIAWAN
NIP. 1973222 199902 3 002